UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Negeri Terkait Dengan Pesawat Udara Sebagai
Jaminan Hutang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**
MELISSA CAROLINE S, Ninik Darmini, SH, MHum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulrahman, Samsul Wahid, *Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminandan Hak-Hak Jaminan Atas Tanah.*Bandung : Alumni, 1984.

Alfons, Maria. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Ringkasan *Disertasi Doktor*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.*Naskah Ilmiah Persiapan Rancangan Undang-undang (Academic Draft) Tentang Hipotik Pesawat Udara*. Jakarta: BPHN, 1981.

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus BesarBahasa Indonesia*. Edisi kedua, 1995.

Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.

Isnaeni, Mochamad. *Hipotik Pesawat Terbang*. Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Negeri Terkait Dengan Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
MELISSA CAROLINE S, Ninik Darmini, SH, MHum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Juwana, Hikmahanto *"Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: StudiKasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention" dalam Jurnal Hukum Bisnis*(Volume 28, Nomor 24 Tahun 2009), hlm. 51-57.

Hs, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Kantaadmadja, Mieke Komar. *Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*. Bandung: Alumni, 1989.

M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Martono, H.K., 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Martono, H.K., 2009, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*. Jakarta: CV. Mandar Maju.

Martono, H.K. dan Ahmad Sudiro, 2010, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI Nomor *1 Tahun 2009*.Jakarta: Rajawali Press.

Martono, H. K. dan Eka Budi Tjahjono.*Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara*. Jakarta: CV. Mandar maju, 2011.

Muhammad A.,*Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Negeri Terkait Dengan Pesawat Udara Sebagai
Jaminan Hutang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**
MELISSA CAROLINE S, Ninik Darmini, SH, MHum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

Rahardjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum,1993.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Satrio J., 1996, Hukum Jaminan, *Hak-hak jaminan Pribadi : Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Satrio, J., 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim HS, Haji. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

Sofwan Sri Soedewi.M, Hukum Jaminan di Indonesia : *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty, 1980.

Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut HukumIndonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Negeri Terkait Dengan Pesawat Udara Sebagai
Jaminan Hutang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**
MELISSA CAROLINE S, Ninik Darmini, SH, MHum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Perundang-undangan:

Convention on International Civil Aviation, ditandatangani di Chicago tanggal 7 Desember 1944.

*Convention on the International Recognation of Right in Aircraft,*ditandatangani di Genewa tanggal 19 Juni 1948.

Convention on International Interest in Mobile Equipment ditandatangani di Cape Town tanggal 16 November 2001.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang *Penerbangan,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182Tahun 1998.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1999.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Negeri Terkait Dengan Pesawat Udara Sebagai
Jaminan Hutang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**
MELISSA CAROLINE S, Ninik Darmini, SH, MHum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Undang-undangNomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor KM 5 Tahun 2006 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang.

Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 *(Civil Aviation Safety Regulation Part 49)* Tentang Pendaftaran Pesawat Udara *(Aircraft Registration)*, Nomor KM. 49 Tahun 2009.